



# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PALOPO  
2021**



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jln. A. Sulthani No. 2 Telp/Fax (0471) 22577  
**KOTA PALOPO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA PALOPO**

**NOMOR: 900 / /BALITBANGDA/VII/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penyusunan Rencana Kerja lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
12. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (LN tahun 2020 nomor 259)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2023;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Palopo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Awal, Rancangan serta Rancangan

Akhir Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2022;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim tersebut bertanggungjawab kepada Walikota Palopo melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal Juli 2021  
KEPALA BADAN,



**ANDI ENCENG, SE, M.Si.**  
NIP. 19691209 199402 2 002

Lampiran Keputusan Kepala Balitbangda Kota Palopo

Nomor / /BALITBANGDA/VII/2021

Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Kota Palopo Tahun 2021

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021**

Ketua Tim : Andi Enceng, SE, M.Si

Sekretaris Tim : Asbi Maulana, SE

Kelompok Kerja

*Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan*

Ketua Pokja : Muhammad Ashari Biduna, S.Sos

Anggota : Arni Hasniani H.S., ST  
Masdiyah, SE  
Suciati, SE  
Muh. Inayat Masri, SE  
Saharuddin Sempo, SP  
Muhajir, SE  
Suriani Iskandar, SE

*Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi*

Ketua Pokja : Amrullah, SH

Anggota : Rizal, SE  
A. Manggawani, Bsc  
A. Heikal Munarka, ST, M.Si  
Monika Ratu Bari, S.Ksi, MT

*Sekretariat*

Ketua Pokja : Haslini Tahir Gani, SE

Anggota : Rakhmat Alamsyah, SH  
Ismail Idris  
Ria Anggraeni, SE, ME  
Asgar, S.An.  
Muhammad Harun Al-Rasyid



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen tahunan OPD sebagai implementasi pentahapan rencana strategis OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, RENSTRA OPD, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan proram serta kegiatan yang berasal dari Bidang.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk periode satu tahun sebagai tahapan pelaksanaan RPJMD dan juga sebagai acuan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD. Penyusunan Renja 2022 merupakan tahun keempat bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo dalam Revisi Renstra Balitbangda 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo sebagai unit kerja Penelitian dan Pengembangan di daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab koordinasi dibidang penelitian dan pengembangan yang diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dengan deskripsi tugas yang sangat strategis bagi Pemerintah Kota Palopo maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo harus didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2021 disusun atas dasar:

24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
26. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
33. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
35. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (LN tahun 2020 nomor 259
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evalalusi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028
42. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2023;
43. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Walikota Palopo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Balitbang Kota Palopo Tahun 2021 yakni:

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2021 memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran serta merupakan tolak ukur berjalannya dan pengendalian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2021 yakni: 1) Sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021; 2) Sebagai acuan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 3) Sebagai alat control organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan; 4) Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, Perubahan Renja Balitbangda Kota Palopo Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda
- 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan Balitbangda Tahun 2021

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 sampai dengan Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja Balitbangda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BALITBANGDA Kota Palopo melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BALITBANGDA dan pencapaian Renstra BALITBANGDA.

##### A. Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo, secara menyeluruh dimulai dengan mengidentifikasi target kinerja ke berbagai indikator kinerja. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja dapat diukur dari indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Pengukuran kinerja berdasarkan target inera dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1. Indikator Sasaran dan Program Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi (Sasaran)	29%	-	-
2	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan (Program)	100%	40%	40%
3	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah (Program)	100%	58 %	58%

Pada Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi (Sasaran) sampai Triwulan II Tahun 2021 realisasinya masih 0%. Hal ini disebabkan karena beberapa sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran tersebut belum selesai dilaksanakan dan sementara dalam progres penyelesaian .

Untuk indikator program Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan, jumlah dokumen hasil kelitbang yang telah selesai sampai dengan triwulan II yakni 2 (dua) Dokumen dari 5 Dokumen yang rencananya akan disusun. Sehingga pencapaian indikator inovasi yang dihasilkan yakni 40%.

Sementara untuk indikator program Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah, realisasinya sebesar 58%. Capaian ini cukup baik, karena telah melebihi target 50% hingga triwulan II.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Secara rinci, anggaran dan realisasi berdasarkan Program, Realisasi Keuangan hingga Triwulan II Tahun 2021 yakni:

**Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Program Balitbangda 2020**

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%tase Realisasi
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	396.207.250	159.294.000	40,20%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.129.326.381	1.235.200.148	58,01%

Tahun 2021, anggaran yang dikelola Balitbangda Kota Palopo sebesar 2.525.533.631,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang dialokasikan pada 2 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub kegiatan. Dari Jumlah dana tersebut hingga Triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.394.494.148 atau sebesar 55,22%.

Secara lebih rinci, Evaluasi Kinerja Program Perangkat Daerah Per Triwulan II Tahun 2021 tersaji dalam tabel 2.3.

## 2.2. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda

Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Balitbangda dalam memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan di Kota Palopo antara lain:

1. Kapasitas kelembagaan Balitbangda yang belum optimal sebagai OPD yang baru dibentuk.
2. Kualitas SDM yang belum sesuai standar kebutuhan unit kerja
3. Adanya inkonsistensi perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan
4. Kurang optimalnya pemetaan urgensi serta peran dan potensi stakeholder kelitbangan dalam mendorong system inovasi daerah
5. Pemanfaatan hasil kelitbangan yang dijadikan landasan kebijakan strategis daerah masih rendah
6. Implementasi rencana dan penganggaran kelitbangan masih rendah
7. Rendahnya jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah
8. Belum optimalnya implementasi kebijakan inovasi daerah di Kota Palopo

Tugas dan fungsi Balitbangda yang memberikan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan, berusaha senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal serta aspiratif bagi pengguna layanan. Adapun isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting strategis antara lain:

1. Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting untuk menunjang aktivitas layanan

dan kinerja Balitbangda dalam penyusunan dokumen hasil penelitian dan pengembangan sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran, factor peluang yang ada dalam lingkungan eksternal menjadi penting, agar kualifikasi SDM yang dibutuhkan dapat terpenuhi, juga memiliki SDM yang professional sesuai tugas dan fungsinya;

2. Penganggaran yang cukup juga merupakan factor yang dapat mendorong terciptanya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang baik dan berkualitas. Dengan penganggaran yang representative, tema penelitian serta cakupan masalah yang akan diteliti dapat lebih luas sehingga memberikan lebih banyak rekomendasi sebagai solusi peningkatan pembangunan di Kota Palopo
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah sangat membutuhkan pemahaman yang baik dalam tata cara penyusunan program dan anggaran. Selain hal tersebut, perencanaan dan penganggaran sebuah lembaga kelitbangan daerah harus terpadu dan tersinkronisasi dengan program strategis di pusat dan provinsi, sehingga koordinasi dan sinergitas dapat terjalin dalam menyusun program kelitbangan daerah
4. Pemetaan urgensi, peran, dan potensi stakeholder kelitbangan penting untuk segera dilaksanakan untuk mendukung berjalannya system inovasi di daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

**Adapun pemetaan isu strategis dalam Renstra Balitbangda 2018-2023 pada yakni**

1. ***Fungsi Kelitbangan dalam pelayanan publik:*** Bagaimana Balitbangda menginisiasi inovasi layanan publik pada perangkat Daerah sehingga pelayanan publik lebih mudah, murah dan efisien
2. ***Penguatan SDM:*** Bagaimana Balitbangda meningkatkan kualitas SDM kelitbangan yang dimilikinya sehingga produk-produk kelitbangan yang dihasilkan menjadi berkualitas dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah.
3. ***Jejaring Kerja Kelitbangan:*** Bagaimana Balitbangda mengembangkan jejaring kerja kelitbangan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai

pihak takeholder kelitbangan dan inovasi dalam menghasilkan program-program yang efisien dan tepat sasaran

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Telaah terhadap kebijakan Nasional mengacu pada Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun Faktor penghambat dan Faktor pendorong dari pelayanan Balitbangda Kota Palopo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari Sasaran jangka menengah BPP Kemendagri ditampilkan pada table di bawah ini:

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Balitbangda Kota Palopo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong ditinjau dari Renstra BPP Kemendagri

NO	Sasaran Jangka Menengah BPP Kemendagri	Permasalahan pelayanan Balitbangda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Belum ada SDM fungsional kelitbangan	- Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mengikutkan ASN pada diklat fungsional Peneliti, Perekayasa maupun Analis kebijakan	- Informasi mengenai diklat tersebut cukup mudah diakses dan tingkat pendidikan Aparatur balitbangda cukup sebagai syarat mengikuti diklat
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri	Balitbangda Kota Palopo belum memiliki Perangkat Kelitbangan yang dapat menilai/mereview kualitas kelitbangan yang telah dihasilkan	- Belum ada RIK sebagai pedoman kelitbangan daerah selama 5 tahun	- Balitbangda bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Kota Palopo
3.	Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah	Belum adanya jurnal yang dikelola Balitbangda untuk media publikasi	- Belum ada SDM yang mampu mengelola Jurnal serta keterbatasan anggaran untuk pembuatann jurnal	- Adanya kesempatan diklat bagi ASN Balitbangda untuk mengelola jurnal oleh LIPI maupun kemendagri
4.	Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri	Masih rendahnya keterlibatan Balitbangda dalam penyusunan kebijakan daerah	- Belum tersosialisasi dan terkoordinasi dengan baik mengenai peran dan fungsi Balitbangda dalam penentuan kebijakan daerah	- Beberapa Regulasi misalnya UU, PP, Permen sudah menjelaskan secara rinci peran dan fungsi Balitbangda dalam penentuan kebijakan daerah

5	Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan	Belum ada mekanisme/regulasi yang mendorong peran Baliitbangda dalam mendorong sebuah rekomendasi menjadi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Baliitbangda baik anggaran maupun SDM dalam menyusun regulasi dalam mendorong peran Baliitbangda dalam mendorong sebuah rekomendasi menjadi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota dan Wakil walikota Palopo mempunyai komitmen mengenai pentingnya kebijakan yang didasari riset</li> </ul>
6	Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi	Kemampuan Baliitbangda untuk memfasilitasi Perangkat Daerah untuk berinovasi masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran yang dikelola Baliitbangda belum mampu melaksanakan kegiatan yang diperuntukkan memfasilitasi OPD dalam berinovasi</li> <li>- Belum ada forum koordinasi antar OPD dalam mendorong inovasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakannya lomba Cipta Inovasi pelayanan Publik dapat mengidentifikasi OPD mana saja yang berinovasi</li> </ul>
7	Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah	Belum adanya kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum direvisinya Roadmap SiDa, sehingga pengembangan inovasi berbasis komoditas unggulan daerah belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemristekdikti memprogramkan fasilitasi penyusunan Roadmap Sida</li> <li>- Adanya kerjasama dengan PT dapat membantu penyusunan Roadmap SIDA</li> </ul>

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Balitbangda Kota Palopo disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.2. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balitbangda Kota Palopo Tahun 2021**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
1	Terwujudnya inovasi daerah yang berkualitas		Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	27%
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	29%
		Meningkatnya dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Ketersediaan dukungan penyelenggaraan urusan	100%

### 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo dirumuskan dengan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi Walikota. Visi Walikota Palopo dalam Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 yaitu ***Terwujudnya Palopo sebagai kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada tahun 2023.***

Balitbangda sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, serta pembangunan inovasi Daerah membantu mewujudkan Visi Kota Palopo melalui Misi Ke-3 dari RPJMD yakni *Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.*

Adapun tujuan, sasaran dan strategi untuk mewujudkan Misi ke 3 (M3) tersebut yakni:

#### ***Tujuan dan Sasaran Misi 3,***

*Tujuan:* Terwujudnya birokrasi profesional kompetitif dan melayani. Sedangkan untuk *sasaran* dalam mewujudkan tujuan tersebut yakni meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk Sasaran *Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah* maka Strategi yang digunakan adalah:

***Memantapkan regulasi, struktur, tata kelola, dan layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah, yang dapat dicapai dengan cara:***

1. Penyediaan regulasi daerah
2. Penegakan regulasi daerah
3. Peningkatan kualitas data, informasi , perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan

***Memantapkan SDM dan kinerja Aparatur dapat terwujud dengan cara:***

1. Peningkatan kompetensi dan motivasi kerja aparatur pemerintah

***Mengembangkan sarana dan prasarana, cakupan dan kualitas layanan dengan penetapan prinsip e-Government dilaksanakan dengan cara:***

1. Peningkatan upaya pemerataan teknologi informasi
2. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi
3. Optimalisasi E-goverment

Untuk Sasaran *meningkatkan kualitas pelayanan publik*, maka strategi yang digunakan adalah:

***Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standardisasi pelayanan dengan cara:***

1. Peningkatan kapasitas SDM terkait pelayanan publik
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Penguatan sistem/regulasi dan penegakan standardisasi pelayanan

***Memantapkan sarana dan prasarana, inovasi, teknologi sistem layanan dan aksesibilitas publik atas layanan dengan penerapan prinsip Smart City***

1. Peningkatan layanan, aksesibilitas dan kepuasan publik atas layanan

2. Sinergitas Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD Kota Palopo 2018-2023, program dan kegiatan Balitbangda serta Perkiraan Pencapaian Tahun 2022 dituangkan dalam **Tabel 3.2**.

Pada Perubahan Renja Balitbangda Tahun 2021, Program Balitbangda berjumlah 2 (dua) Program. Pagu indikatif yang dirumuskan sebesar **Rp. 2.816.384.165 ( Dua Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)** yang bersumber dari APBD Kota Palopo

Dengan rumusan tersebut, apabila program/kegiatan yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD maupun pagu indikatif, maka Balitbangda Kota Palopo hanya akan melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak terlebih dahulu dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk layanan kesekretariatan

Adapun Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Balitbangda Kota Palopo Tahun 2021 ini merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021 yang berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan akuntabilitas Balitbangda serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD 2021.

Akhirnya, dengan tersusunnya Perubahan Renja Balitbangda 2021 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak positif terhadap kinerja aparatur Balitbangda ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Palopo, Juli 2021

Kepala Balitbangda,



ANDI ENCENG, SE, M.Si.  
NIP. 19691209 199402 2 002

TABEL 2.3.

**EVALUASI KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN II TAHUN 2021  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PALOPO**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KOTA PALOPO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2021		REALISASI TCAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2021 (Triwulan I)		REALISASI TCAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2021 ( Sampai dengan Triwulan II)	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5		5	
	Urusan Wajib							
	Pemerintahan Umum							
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100	467,000,000	0	59,350,000	40	159,294,000
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</i>	1	114,250,000	0	59,350,000	1	104,894,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	1	114,250,000	0	59,350,000	1	104,894,000
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Jumlah Hasil kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti</i>	1	70,800,000	0	-	0	-
	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek- aspek sosial	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	1	70,800,000	0	-	0	-
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti</i>	3	187,850,000		-	1	54,400,000

	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	1	74,651,500		-	0	-
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	2	113,198,500		-	1	54,400,000
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Inovasi yang difasilitasi</b>	<b>15</b>	<b>94,100,000</b>		-	<b>0</b>	-
	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Invensi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	1	40,225,000		-	0	-
	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Inovasi Daerah	1	53,875,000		-	0	-
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Derah</b>	<b>100</b>	<b>2,205,000,000</b>	<b>25</b>	<b>450,360,003</b>	<b>50</b>	<b>1,235,200,148</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>8</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5</b>	<b>500,000</b>	<b>5</b>	<b>500,000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	7	500,000	4	-	4	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	500,000	1	500,000	1	500,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>12</b>	<b>1,841,477,050</b>	<b>3</b>	<b>410,529,458</b>	<b>6</b>	<b>1,071,390,189</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	20	1,786,477,050	23	399,129,458	23	1,048,390,189
	Pelaksanaan Penata Usahanaa dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	500	54,000,000	46	10,900,000	113	22,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	2	1,000,000	1	500,000	1	500,000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Aset</b>	<b>2</b>	<b>6,600,000</b>	<b>1</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1</b>	<b>2,750,000</b>

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatkelolakan	167	6,600,000	167	1,650,000	167	2,750,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatkelolakan</b>	<b>2</b>	<b>145,486,750</b>	<b>2</b>	<b>16,408,400</b>	<b>2</b>	<b>88,267,164</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	4	5,280,000	3	400,000	3	1,060,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	45	140,206,750	6	16,008,400	30	87,207,164
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>6</b>	<b>19,874,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	6	19,874,000	0	-	0	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai</b>	<b>3</b>	<b>155,842,200</b>		<b>19,272,145</b>		<b>53,056,245</b>
	Pemyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat, ATK. Cetak dan Penggandaan	600	28,999,000	150	4,250,000	350	10,174,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	2	56,720,000	1	1,602,145	2	13,286,645
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	8	70,123,200	8	13,420,000	8	29,595,600
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharannya dibiayai</b>	<b>20</b>	<b>34,720,000</b>	<b>2</b>	<b>2,000,000</b>	<b>9</b>	<b>19,236,550</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1	26,250,000	1	2,000,000	1	17,236,550
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3	600,000	1	-	0	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharannya dibiayai	15	3,500,000	0	-	8	2,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1	4,370,000	0	-	0	-

TABEL 3.1

**MATRIKS PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA PALOPO TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KOTA PALOPO**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN							SESUDAH PERUBAHAN								
					LOKASI	CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	LOKASI	CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		PAGU INDIKATIF
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
	Urusan Wajib																			
	Pemerintahan Umum																			
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100					467,000,000		Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100				396,207,250	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan									Jumlah Hasil kelibngan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	1	114,250,000					Jumlah Hasil kelibngan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	1	104,900,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				Kota Palopo			Jumlah dokumen hasil kelibngan bidangpemerintahan umum yang dihasilkan	1			114,250,000	Kota Palopo			Jumlah dokumen hasil kelibngan bidangpemerintahan umum yang dihasilkan	1		104,900,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				Kota Palopo					Jumlah Hasil kelibngan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	1	70,800,000	Kota Palopo				Jumlah Hasil kelibngan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	1	68,000,000	
	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial				Kota Palopo			Jumlah dokumen hasil kelibngan bidang sosial yang dihasilkan	1			70,800,000	Kota Palopo			Jumlah dokumen hasil kelibngan bidang sosial yang dihasilkan	1		68,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									Jumlah Hasil kelibngan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	2	187,850,000					Jumlah Hasil kelibngan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	2	179,707,250	

	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Kota Palopo		Jumlah dokumen hasil kelitbangan koperasi dan UKM yang dihasilkan	1			74,651,500	Kota Palopo		Jumlah dokumen hasil kelitbangan koperasi dan UKM yang dihasilkan	1		68,900,000
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				Kota Palopo		Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	1			113,198,500	Kota Palopo		Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	1		110,807,250
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>				Kota Palopo				<b>Jumlah Inovasi yang difasilitasi</b>	<b>19</b>	<b>94,100,000</b>	<b>Kota Palopo</b>			<b>Jumlah Inovasi yang difasilitasi</b>	<b>19</b>	<b>43,600,000</b>
	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Invensi di Bidang difusi inovasi dan Penerapan Teknologi				Kota Palopo		Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	1			40,225,000	Kota Palopo		Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	1		-
	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan				Kota Palopo		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Inovasi Daerah	1			53,875,000	Kota Palopo		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Inovasi Daerah	1		43,600,000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>				Kota Palopo	<b>100</b>	<b>Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Derah</b>				<b>2,205,000,000</b>	Kota Palopo		<b>100</b>	<b>Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Derah</b>		<b>2,129,326,381</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Kota Palopo				<b>Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>8</b>	<b>1,000,000</b>	Kota Palopo			<b>Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>8</b>	<b>1,000,000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kota Palopo		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	7			500,000	Kota Palopo		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	7		500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kota Palopo		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1			500,000	Kota Palopo		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1		500,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				Kota Palopo				<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>12</b>	<b>1,841,477,050</b>	Kota Palopo			<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>12</b>	<b>1,809,092,466</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kota Palopo		Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	23			1,786,477,050	Kota Palopo		Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	23		1,754,092,466

	Pelaksanaan Penata Usahaana dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD				Kota Palopo		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	500			54,000,000	Kota Palopo		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	500		54,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Kota Palopo		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	2			1,000,000	Kota Palopo		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	2		1,000,000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>										<b>2</b>						<b>6,600,000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Kota Palopo		Jumlah Aset yang ditatkelolakan	170			6,600,000	Kota Palopo		Jumlah Aset yang ditatkelolakan	170		6,600,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>2</b>						<b>143,901,000</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Kota Palopo		Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	4			5,280,000	Kota Palopo		Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	4		3,960,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kota Palopo		Jumlah SPPD yang dilaksanakan	50			140,206,750	Kota Palopo		Jumlah SPPD yang dilaksanakan	50		139,941,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				Kota Palopo		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>				<b>6</b>			<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>			<b>-</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kota Palopo		Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	6			19,874,000	Kota Palopo		Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	6		-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				Kota Palopo						<b>3</b>						<b>135,152,200</b>
	Pemyediaan Jasa Surat Menyurat				Kota Palopo		Jumlah Surat Menyurat, ATK, Cetak dan Penggandaan	610			28,999,000	Kota Palopo		Jumlah Surat Menyurat, ATK, Cetak dan Penggandaan	610		28,999,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik				Kota Palopo		Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	2			56,720,000	Kota Palopo		Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	2		36,720,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kota Palopo		Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	8			70,123,200	Kota Palopo		Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	8		69,433,200

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				Kota Palopo				<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaan dibiayai</b>	<b>20</b>	<b>34,720,000</b>	Kota Palopo				<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaan dibiayai</b>	<b>20</b>	<b>33,580,715</b>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kota Palopo		Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1			26,250,000	Kota Palopo		Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1			26,250,000					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kota Palopo		Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3			600,000	Kota Palopo		Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3			600,000					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kota Palopo		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharaan dibiayai	15			3,500,000	Kota Palopo		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharaan dibiayai	15			3,500,000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kota Palopo		Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1			4,370,000	Kota Palopo		Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1			3,230,715					
<b>JUMLAH ANGGARAN YANG DIUSULKAN</b>																				<b>2,672,000,000</b>			<b>2,525,533,631</b>

TABEL 3.1

**MATRIKS PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA PALOPO TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KOTA PALOPO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN				
					LOKASI	CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	LOKASI	CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF
						Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	
	Urusan Wajib											
	Pemerintahan Umum											
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah											
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100	467,000,000		Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100	464,807,250
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</i>					<i>Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</i>	1	114,250,000		<i>Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</i>	2	141,500,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	1	114,250,000	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	2	141,500,000
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>					<i>Jumlah Hasil kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti</i>	1	70,800,000		<i>Jumlah Hasil kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti</i>	1	68,000,000
	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial				Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	1	70,800,000	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	1	68,000,000

	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>					<b>Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	<b>2</b>	<b>187,850,000</b>		<b>Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	<b>2</b>	<b>199,707,250</b>
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan Perindustrian dan Perdagangan yang dihasilkan	1	74,651,500	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan Perindustrian dan Perdagangan yang dihasilkan	1	78,900,000
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	2	113,198,500	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	2	120,807,250
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>					<b>Jumlah Inovasi yang difasilitasi</b>	<b>15</b>	<b>94,100,000</b>			<b>15</b>	<b>55,600,000</b>
	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Inovasi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				Kota Palopo	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	1	40,225,000	Kota Palopo	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	1	-
	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan				Kota Palopo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Inovasi Daerah	1	53,875,000	Kota Palopo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Inovasi Daerah	1	55,600,000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				Kota Palopo	<b>Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2,205,000,000</b>	Kota Palopo	<b>Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</b>		<b>2,351,576,915</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>8</b>	<b>1,000,000</b>		<b>Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>8</b>	<b>1,000,000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kota Palopo	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	7	500,000	Kota Palopo	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	7	500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kota Palopo	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	500,000	Kota Palopo	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	500,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>12</b>	<b>1,841,477,050</b>		<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>12</b>	<b>2,019,602,180</b>

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kota Palopo	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	23	1,786,477,050	Kota Palopo	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	23	1,964,602,180
	Pelaksanaan Penata Usahanaa dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD				Kota Palopo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	500	54,000,000	Kota Palopo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	500	54,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	2	1,000,000	Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	2	1,000,000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>					<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Aset</b>	<b>2</b>	<b>6,600,000</b>		<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Aset</b>	<b>2</b>	<b>6,600,000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Kota Palopo	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	170	6,600,000	Kota Palopo	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	170	6,600,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan</b>	<b>2</b>	<b>145,486,750</b>		<b>Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan</b>	<b>2</b>	<b>156,961,820</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Kota Palopo	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	4	5,280,000	Kota Palopo	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	4	3,960,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kota Palopo	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	50	140,206,750	Kota Palopo	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	50	153,001,820
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>6</b>	<b>19,874,000</b>	Kota Palopo	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kota Palopo	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	6	19,874,000	Kota Palopo	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	6	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai</b>	<b>3</b>	<b>155,842,200</b>		<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai</b>	<b>3</b>	<b>134,132,200</b>
	Pemyediaan Jasa Surat Menyurat				Kota Palopo	Jumlah Surat Menyurat, ATK, Cetak dan Penggandaan	610	28,999,000	Kota Palopo	Jumlah Surat Menyurat, ATK, Cetak dan Penggandaan	610	24,499,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik				Kota Palopo	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	2	56,720,000	Kota Palopo	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	2	38,700,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kota Palopo	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	8	70,123,200	Kota Palopo	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	8	70,933,200

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaan dibiayai</b>	<b>20</b>	<b>34,720,000</b>		<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaan dibiayai</b>	<b>20</b>	<b>33,280,715</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1	26,250,000	Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1	26,250,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3	600,000	Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3	300,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kota Palopo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharaan dibiayai	15	3,500,000	Kota Palopo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharaan dibiayai	15	3,500,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kota Palopo	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1	4,370,000	Kota Palopo	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1	3,230,715
<b>JUMLAH ANGGARAN YANG DIUSULKAN</b>								<b>2,672,000,000</b>				<b>2,816,384,165</b>